

Paradigma Pengembangan Keilmuan di UIN Malang

Indonesia dikenal sebagai negara plural, baik baik dari sisi budaya, agama, ras, dan lain-lain. Keragaman yang dipersatukan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika yang menyatu pada lambang negara. “Persatuan dalam keragaman” ini memang menunjukkan semangat dan kesadaran pluralis bangsa ini, dan setiap anak bangsa merasa bangga dengan kekayaan yang tercermin dari keragaman itu. Namun, akhir-akhir ini, keragaman yang selama ini dibanggakan telah ternodai oleh serangkaian peristiwa kekerasan yang mengambil pola dan basis justru pada faktor-faktor yang kita banggakan dalam konteks keragaman itu.

Di banyak tempat, anak-anak bangsa ini “seakan” menggalang tindak kekerasan dengan mengatasnamakan agama, ras, suku, dan perbedaan golongan. Tampaknya ada atau bahkan banyak yang tidak beres dari semangat dan cara kita mengelola keragaman ini, sehingga di satu sisi mencuatkan harapan dan kebanggaan, namun di sisi lain memunculkan eksese destruktif, yang bahkan sangat mengerikan.

Di antara sekian faktor keragaman itu, agama seringkali dipertontonkan sebagai pemicu kekerasan dan berbagai instabilitas di negeri ini, sehingga agama atau apa pun yang dilekatkan ke pada agama menjadi terkesan buruk, primordial, fanatis, picik, kasar, dan potensial merusak. Seperti halnya asumsi adanya sesuatu yang tidak beres pada pemahaman kita terhadap faktor-faktor pluralitas demikian juga semangat dan cara pengelolaannya saya juga menduga ada yang tidak beres dari cara kita memahami agama. Agama yang kita yakini sebagai ajaran suci Tuhan Yang Mahasuci, justru kita pahami dan terapkan dengan cara-cara yang sangat eksklusif, seakan-akan Tuhanlah yang menghendaki kerusakan dan berbagai kekerasan itu.

Dalam kenyataan, hampir seluruh warga masyarakat di negeri ini adalah umat beragama atau umat yang mengaku mengikuti ajaran Tuhan. Negara kita pun bukan negara sekular, melainkan negara yang dibangun berdasarkan asas Ketuhanan, yang dengan demikian sadar dengan realitas dan signifikansi keagamaan dalam proses membangun kehidupan bangsa. Berbagai persoalan keagamaan juga dikelola dengan berbagai perangkat perundangan, termasuk di dalamnya adalah persoalan pendidikan agama di dalam sistem pendidikan dan persekolahan. Kendatipun sistem pendidikan kita berasaskan keragaman, namun dari sudut pandang tertentu, sistem pendidikan yang dibangun berdasarkan semangat keagamaan sering dipandang sebelah mata, tanpa memperdulikan akan pentingnya membangun bangsa ini melalui pendekatan agama dan pendidikan keagamaan. Boleh jadi, karena itulah sehingga kemudian pendidikan agama, berikut lembaga pendidikan keagamaan tidak secara memadai diperhatikan, kendatipun diakui sah seperti lembaga pendidikan akademik pada umumnya.

Banyak pihak menengarahi persoalan yang menimpa bangsa Indonesia pada saat ini berpangkal pada kelemahan moral dan spiritual. Jika demikian adanya, maka menegaskan posisi agama sebagai basis pembangunan, sekaligus agama sebagai basis pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan. Akan tetapi, bagaimana hal ini dapat terjadi? Apakah mungkin ilmu pengetahuan dan berbagai tindak rasional didasarkan pada dasar dan landasan sesuatu yang populer dipandang tidak rasional dan tidak ilmiah? Tampaknya kita lupa bahwa filsafat yang merupakan basis

ilmu dan the mother of science itu tidak ilmiah, dan inilah yang disebut sebagai unscientific base of science (dasar tidak ilmiah dari sains). Di sini, menurut saya, agama dapat diposisikan paralel dengan filsafat, karena sama-sama bersifat normatif dan menyuguhkan sebuah pandangan dunia yang universal, sehingga tidak ada kesulitan jika agama diletakkan sebagai basis ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kesulitannya tidak terletak pada agamanya, melainkan pada pemahaman keagamaan umat beragama itu sendiri, yang seringkali tidak sejalan atau tidak benar-benar mencerminkan hakikat agama dan ajaran-ajarannya.

Umat beragama tidak mustahil memiliki pemahaman yang salah tentang agamanya serta ajaran-ajarannya. Seperti telah disinggung di atas, boleh jadi kekerasan dan segala yang tidak baik dialamatkan kepada agama yang suci dan berasal dari Yang Mahasuci. Demikian pula yang terjadi pada sebagian umat Islam, yang dalam hal ilmu pengetahuan, budaya, dan seni, pandangan mereka tidak sepenuhnya sejalan dengan jati diri Islam dan ajaran-ajarannya. Ilmu pengetahuan, budaya, dan seni dipandang terlepas dari keagamaan Islam, sementara di pihak lain mereka meyakini bahwa Islam itu sebagai agama yang universal. Pemahaman yang kurang memadai inilah yang sebagiannya tercermin pada praktik pendidikan tinggi Islam saat ini. Dalam sistem pendidikan Islam, ilmu pengetahuan (sains), budaya, dan seni, dipandang bukan merupakan bagian dari kajian keagamaan Islam, sehingga pandangan tentang agama tampak sempit.

Oleh karena itu, tidak heran jika ada kesan miring ketika perguruan tinggi Islam dikaitkan atau dibandingkan dengan perguruan tinggi umum. Perguruan tinggi Islam dipersepsi hanya menyelenggarakan pendidikan untuk kawasan yang sempit, yaitu kawasan keagamaan semata. Selain itu, perguruan tinggi Islam dinilai kurang progresif dalam pengembangan keilmuannya, tidak ada budaya riset, cenderung konservatif, dan tidak peduli dengan perkembangan modern. Kesan miring ini, sedikit atau banyak, memang terbukti benar, terutama ketika mengamati banyak perguruan tinggi Islam yang kinerjanya kurang meyakinkan sebagai perguruan tinggi yang sehat, berkualitas, dan kompetitif. Bagaimanapun, kesan ini di samping membuat miris kalangan perguruan tinggi Islam, juga Departemen Agama yang menanganinya; namun, kesan ini pun ditanggapi secara konstruktif dan produktif oleh sebagian perguruan tinggi Islam, termasuk di antaranya UIN Malang, sehingga bangkit untuk menemukan berbagai bentuk kreativitas dalam rangka membangun citra yang lebih kompetitif.

Salah satu upaya fundamental dan strategis yang ditempuh UIN Malang adalah melakukan rekonstruksi paradigma keilmuan, dengan meletakkan agama sebagai basis ilmu pengetahuan. Upaya ini dipandang fundamental dan strategis bahkan dalam kerangka pengembangan UIN Malang ke depan, upaya ini mendapatkan prioritas terpenting yang perlu dibenahi adalah karena konstruk keilmuan ini merupakan nafas atau ruh setiap perguruan tinggi. Persoalan terpenting dari kerangka pengembangan ilmu di perguruan tinggi Islam adalah tidak relevannya konstruk keilmuan yang dikembangkan dengan visi dan misi yang hendak dijalankan. Apa yang dipahami mengenai ilmu, budaya, dan seni, yang dikaitkan dengan agama dalam hal ini Islam seringkali menunjukkan pemahaman yang sangat sempit, yang kemudian berimplikasi pada sempitnya wilayah garapan perguruan tinggi Islam, seperti yang dikesankan itu. Paradigma keilmuan, budaya, dan seni Islam yang dikembangkan oleh perguruan tinggi Islam masih terasa tidak relevan dengan jati diri sebenarnya dari Islam yang berwatak universal dan menjadi rahmat

bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamîn. Paradigma ilmu termasuk dalam persoalan budaya dan seni yang dipelihara dan dijadikan acuan baku oleh perguruan tinggi Islam masih sangat konservatif, seperti tercermin pada adanya dikotomi ilmu, yakni ilmu umum versus ilmu agama, atau dikotomi ilmu versus agama. Paradigma itulah yang perlu dikonstruksi kembali untuk mengawali perubahan-perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan perguruan tinggi Islam, dan inilah yang dilakukan oleh UIN Malang.

Menengok Sejarah

Ketika mendapatkan tugas memimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang pada awal tahun 1998, saya mencoba untuk menelusuri pikiran-pikiran yang berkembang sejak awal, sehingga sejarah ini mengantarkan lahirnya perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sekalipun pada awalnya lembaga pendidikan tinggi Islam sebatas berupa akademi, yaitu ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama), yang misinya sederhana yaitu menyiapkan tenaga administrasi di lingkungan Departemen Agama, tetapi sesungguhnya menyimpan pikiran-pikiran yang sangat luas dan mendalam terkait dengan upaya mengintegrasikan dua bidang keilmuan pada diri lulusannya, yaitu berkeahlian ilmu agama Islam dan sekaligus ahli di bidang ilmu-ilmu umum. Lembaga pendidikan tinggi ini kemudian berubah menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, dan selanjutnya berubah lagi menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri). IAIN ini ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama berkembang pesat. Dimulai dari IAIN Yogyakarta dan disusul IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, maka kemudian tumbuh perguruan tinggi Islam negeri, hingga berjumlah 14 buah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ke-14 IAIN ini, 7 (tujuh) di antaranya di Sumatera, sedangkan lainnya, di Jawa lima buah, Kalimantan dan Sulawesi masing-masing satu IAIN.

Perkembangan kuantitatif lembaga pendidikan tinggi Islam tidak berhenti sebatas 14 buah IAIN itu. Berbagai daerah tingkat kabupaten di tanah air ini, yang tidak mau ketinggalan, juga membuka perguruan tinggi Islam dengan status sebagai fakultas-fakultas filial atau cabang, berinduk pada IAIN setempat. Di Jawa Timur, misalnya, selain berdiri IAIN Sunan Ampel Surabaya, berdiri pula fakultas-fakultas cabang yang tersebar di beberapa kota kabupaten atau kotamadya, yaitu Fakultas Ushuluddin di Kediri, Fakultas Syariah di Ponorogo, Fakultas Tarbiyah masing-masing di Malang, Tulung Agung, Bojonegoro, Pamekasan, dan Jember. Selain itu, masih juga merupakan cabang IAIN Sunan Ampel, berdiri pula cabang lainnya yaitu Fakultas Tarbiyah di Mataram dan Samarinda. Fenomena munculnya fakultas cabang seperti itu juga terjadi di hampir semua IAIN di Indonesia. Akibatnya, sebuah IAIN, jika dilihat dari jumlah fakultasnya tampak tidak lazim, yakni memiliki fakultas ganda misalnya sebuah IAIN memiliki beberapa fakultas tarbiyah, yang sesungguhnya fakultas-fakultas itu merupakan cabang dari lembaga induknya, bukan cabang dari fakultas yang ada di induknya. Selain itu kemudian dalam satu institut dikenal ada istilah fakultas induk selain fakultas cabang yang berada di berbagai kota tersebut.

Tanpa ingin mencari-cari dalih pembenar, pada saat itu fenomena perguruan tinggi dengan berbagai filialnya, tidak saja terjadi di lingkungan Departemen Agama, melainkan juga di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Brawijaya, misalnya, memiliki cabang di beberapa kota, misalnya di Jember. Begitu pula IKIP Malang memiliki cabang di Lumajang, Jember dan Madiun. Perguruan tinggi

yang berstatus filial yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 1970-an dilakukan rasionalisasi dengan jalan menarik mereka kembali ke induk masing-masing. Seluruh dosen dan karyawan serta fasilitas yang terlanjur dimiliki oleh masing-masing fakultas filial dipindah ke perguruan tinggi induknya. Berbeda dengan perguruan tinggi umum yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi agama yang berada di bawah pembinaan Departemen Agama diputuskan untuk diubah statusnya menjadi sekolah tinggi. Kebijakan tersebut, sesungguhnya agak terlambat, yakni baru dilakukan pada pertengahan tahun 1997.

Kebijakan Departemen Agama mengubah fakultas cabang di seluruh IAIN menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadikan di tanah air ini terdapat 14 IAIN dan 33 STAIN. Dengan statusnya yang baru itu, maka seluruh STAIN menyanggah otonomi yang seluas-luasnya sehingga mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Khusus IAIN Malang yakni Fakultas Tarbiyah, sekalipun dalam sejarah awal kelahirannya berstatus fakultas induk, sama dengan fakultas-fakultas lain di induknya, IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak IAIN Surabaya membuka Fakultas Tarbiyah tersendiri dengan jalan memindahkan Fakultas Tarbiyah cabang Bojonegoro ke Surabaya, maka status fakultas induk yang disandang oleh Fakultas Tarbiyah Malang berubah menjadi fakultas cabang. Oleh karena itu, ketika Departemen Agama mengubah status fakultas cabang menjadi STAIN, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang pun dengan sendirinya berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Satu hal yang agak aneh, bahwa STAIN selalu dipandang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berukuran lebih kecil daripada IAIN. Perbedaannya bukan dilihat dari luasnya cakupan bidang ilmu yang dikembangkan, melainkan pada struktur birokrasinya. Akibatnya jumlah bidang ilmu yang dikembangkan oleh IAIN bisa jadi sama dengan jumlah yang dikembangkan oleh STAIN. Hal ini terjadi karena tidak adanya batasan pengertian tentang lembaga pendidikan tinggi tersebut, yang kemudian berakibat lembaga baru ini leluasa membuka berbagai jurusan yang lazim dikembangkan oleh IAIN. Konsekuensi selanjutnya bisa jadi jumlah jurusan/program studi di STAIN sama atau bahkan lebih banyak daripada yang dikembangkan oleh IAIN. Oleh karena itu, STAIN seringkali disindir sebagai IAIN kecil lantaran jumlah jurusan/program studi yang dimiliki sama dengan yang dikembangkan oleh IAIN. Hal yang demikian itu sesungguhnya tidak akan terjadi, jika sejak awal fakultas cabang tidak diberi status Sekolah Tinggi Agama Islam, yang membawa keleluasaan membuka berbagai jurusan/program studi, melainkan dibatasi sebatas mengembangkan jenis bidang ilmu yang selama itu dikembangkan, misalnya cabang Fakultas Tarbiyah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin cabang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin, Syariah dan seterusnya. Akan tetapi, itu semua sudah terjadi, dan biasanya, jika institusi pendidikan sudah berjalan, maka kebijakan menutupnya justru lebih sulit daripada membukanya.

Selanjutnya, melalui penelusuran sejarah perguruan tinggi Islam ini, ditemukan bahwa kehadiran IAIN selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Departemen Agama, baik sebagai guru agama maupun sebagai pegawai Departemen Agama, di pusat maupun di daerah, memiliki misi yang sangat jelas yaitu ingin menjadikan para lulusannya sebagai sarjana (intelektual) sekaligus ulama. Sebutan sarjana atau intelektual

untuk menggambarkan seseorang yang telah menamatkan pendidikan di perguruan tinggi. Sedangkan ulama adalah sebutan terhadap seseorang yang memiliki pengetahuan, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam secara mendalam. Para penyandang gelar ulama menurut tradisi selama itu selalu lahir dari lembaga pendidikan pesantren. Bahkan Prof. Dr. Mukti Ali, (alm) mantan Menteri Agama menyatakan bahwa tidak pernah ada seorang ulama yang lahir dari lembaga selain pesantren. Seorang ulama memang lahir setelah sekian lama menggali ilmu pengetahuan di pondok pesantren. Harapan yang cukup populer dan sangat mulia bagi lulusan perguruan tinggi agama Islam negeri atau IAIN ini adalah agar lulusannya menjadi ulama yang intelek dan atau intelek yang ulama. Selanjutnya, agar rumusan itu sesuai dengan tuntutan zaman, khusus untuk STAIN Malang yang kini telah berubah menjadi UIN Malang, rumusan itu disempurnakan menjadi ulama yang intelek profesional dan atau intelek dan ulama yang profesional. Kata profesional dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern yang semua hal dituntut dilakukan oleh profesi masing-masing atau setidaknya dilakukan secara profesional.

Pada awal perubahan status dari Fakultas Tarbiyah menjadi bentuk Sekolah Tinggi, STAIN Malang hanya memiliki dua jurusan yang resmi, yaitu jurusan Tarbiyah dan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Berdasarkan kesimpulan dari kajian dan diskusi panjang dengan melibatkan berbagai pihak, dua jurusan yang dimiliki oleh STAIN Malang tersebut dipandang kurang memadai. Apalagi, jika hal itu dikaitkan dengan tuntutan kebutuhan riil madrasah. Status madrasah sebagai input dan sekaligus pengguna lulusan Fakultas Tarbiyah sudah berubah paradigmanya dari semula. Madrasah yang awalnya merupakan sekolah agama, diubah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Sudah barang tentu perubahan paradigma madrasah tersebut akan membawa konsekuensi perubahan pada tuntutan terhadap jenjang lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yaitu STAIN atau IAIN. Madrasah setelah perubahan itu tidak lagi membutuhkan tenaga guru agama dalam jumlah besar, tetapi justru membutuhkan guru-guru bidang studi ilmu-ilmu umum, seperti biologi, matematika, fisika, kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial dan sejenisnya. Guru Agama, bisa jadi untuk sementara waktu, tidak lagi diperlukan penambahan, malahan yang sudah ada di beberapa tempat sudah dipandang melebihi kebutuhan. Atas dasar kenyataan itulah maka STAIN Malang membuka jurusan baru, yaitu tadris jurusan matematika, biologi dan Bahasa Inggris, selain jurusan yang telah ada sebelumnya.

Tatkala STAIN Malang membuka jurusan umum tersebut, segera muncul semacam tuntutan pertanggungjawaban baik yang berasal dari kalangan-dalam (intern) maupun masyarakat pada umumnya. Tuntutan itu terjadi terutama terkait dengan anggapan sebagian orang bahwa pada awalnya misi perguruan tinggi Islam, termasuk STAIN adalah melakukan kajian dan pendidikan serta pengajaran ilmu ke-Islaman. Ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh IAIN dan juga STAIN yang dianggap lazim adalah Ilmu Tarbiyah, Ilmu Syariah, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Dakwah dan Ilmu Adab. Jika kemudian STAIN membuka program studi umum seperti matematika, biologi, fisika, ekonomi, psikologi, humaniora dan sebagainya, maka persoalannya ialah di mana akan diposisikan jenis ilmu agama Islam yang dianggap sudah baku itu? Pertanyaan selanjutnya adalah apakah program studi umum itu diperlakukan sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan ad-hock bagi madrasah-madrasah yang membutuhkan guru bidang studi umum tersebut, ataukah dapat dimasukkan sebagai core bidang ilmu ke-Islaman itu sendiri. Pertanyaan

itu sempat merisaukan berbagai kalangan, setidaknya bagi kalangan internal kampus, karena jika pembukaan program-program ilmu umum itu hanya sekedar bersifat ad-hock, berarti memerlukan dukungan laboratorium, perpustakaan dan apalagi tenaga pengajar tetap. Dan, hal itu berbeda jika jurusan ilmu-ilmu umum itu dimasukkan sebagai core yang tidak terpisahkan dari ilmu tentang Islam itu sendiri.

Pembukaan program studi umum tersebut ternyata tidak saja dilakukan di STAIN Malang, melainkan juga dibuka di hampir seluruh IAIN dan STAIN di Indonesia. Ketika itu tidak ada edaran dari Departemen Agama agar IAIN dan STAIN membuka program studi umum. Kebijakan pimpinan PTAIN tersebut dimaksudkan sebagai upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan di lapangan. Memang itulah yang biasa terjadi dan lazim, sebab kenyataannya selama ini penambahan maupun perubahan perguruan tinggi Islam lebih banyak diprakarsai dari kekuatan bawah. Departemen Agama sebagai pemegang otoritas pengembangan dan pembinaan perguruan tinggi Islam, terutama terkait dengan kelembagaannya, lebih tepat disebut sebagai fasilitator dan atau legalisator belaka.

Pembukaan program studi umum ini membawa implikasi perlunya proses sosialisasi baik di kalangan internal kampus maupun eksternal kampus. Sosialisasi ini dirasakan semakin pentingnya, sebab dengan pembukaan program studi umum tersebut, dipandang oleh sebagian orang suatu yang keluar dari tradisinya. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut orientasi, arah pengembangan, dasar kebijakan dan seterusnya selalu muncul baik berasal dari kalangan-dalam, yaitu dosen, karyawan, mahasiswa, maupun kalangan luar kampus. Sebagai upaya untuk menjelaskan perkembangan baru, setidaknya untuk memberikan gambaran yang bisa diterima oleh semua pihak tentang relevansi antara kajian Islam yang selama ini lebih dianggap tepat dengan ilmu-ilmu baru yang dikategorikan ilmu umum itu, dibangun metafora yang mudah diterima oleh seluruh kalangan. Dari hasil perenungan dan pemikiran yang lama dan mendalam maka akhirnya ditemukanlah gambar sebatang pohon yang dipandang mudah digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan bangunan ilmu dalam perspektif kurikulum yang dikembangkan oleh [UIN Malang](#) sejak statusnya masih STAIN.